

**PENGARUH KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASET
DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPETEN EMPAT LAWANG**



SKRIPSI

Diajukan oleh:

Weni Herlianti
NPM. 2362201118P

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PENGARUH KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASET
DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Manajemen
Universitas Muhammadiyah Bengkulu**

oleh :

**WENI HERLIANTI
NPM. 2362201118P**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASET DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG



SKRIPSI

Diajukan oleh:

Weni Herlianti
NPM. 2362201118P

Disetujui Oleh:
Pembimbing

Nensi Yuniarti, Zs, S.E., M.Ak
NIDN. 0219048703

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Furqoni Ranidiah, S.E., MM.
NIDN. 0208047301

PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI

PENGARUH KEBIJAKAN PENGECOLAAN ASET DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
guna memperoleh gelar Sarjana Manajemen

Hari : Kamis

Tanggal : 07 Agustus 2025

SKRIPSI

Oleh:

WENI HERLIANTI
NPM. 2362201118P

Dewan Penguji:

1. Furqonti Ranidiah, SE.,MM

Ketua

2. Dinal Eka Pertiwi, SE.,M.Ak

Anggota

3. Nensi Yuniarti. Zs, SE.,M.Ak

Anggota

Megetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Furqonti Ranidiah, SE., MM

NIDN 0208047301



SERTIFIKASI

Saya **WENI HERLIANTI** bertanda tangan dibawah ini, menyatakan bahwa benar skripsi yang saya ajukan ini adalah hasil karya sendiri atas bimbingan dosen pembimbing. Karya ini belum pernah disampaikan untuk mendapatkan gelar sarjana pada program studi manajemen fakultas ekonomi dan bisnis atau pada program studi lainnya. Karna karya ilmiah ini milik saya, maka segala sesuatu yang berhubungan dengan karya ini menjadi tanggung jawab saya.

Bengkulu, 7 Agustus 2025

Yang membuat



weni Herlianti
NPM. 2362201118P

MOTTO

“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia”

_Nelson Mandela

“Kegagalan adalah guru terbaik yang akan mengajarkanmu cara untuk berhasil”

_Timoty Ronald

“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan, menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat begitu luar biasanya, memberikan saya kekuatan dan membekali dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, akhirnya SKRIPSI yang sederhana ini dapat terselesaikan tepat waktu. Segala perjuangan saya hingga titik ini, saya persembahkan teruntuk orang-orang hebat yang selalu menjadi penyemangat, menjadi alasan saya kuat sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir SKRIPSI ini.

- ❖ Almarhum Ayah dan Almarhumah Ibu tercinta, terimakasih atas do'a dan pengorbanannya selama ini. Sungguh cinta kasih ayah dan ibu yang tulus, dan kasih sayangnya yang tak akan pernah terlupa dan tak akan pernah tergantikan. Semoga kesuksesanku ini dapat membanggakan ayah dan ibu yang sudah tenang di syurga-Nya
- ❖ Suamiku tercinta, Megi Sugianto, SE.,M.Sos terimakasih atas do'a dan dukungan baik itu moril dan materil yang begitu luar biasa sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini
- ❖ Adik, Kakak dan Ayuk tercinta yang sudah memberikan dukungan serta do'a yang begitu luar biasa
- ❖ Untuk pembimbing skripsi saya ibu Nensi Yuniarti. Zs, S.E.,M.Ak terimakasih sudah membimbing skripsiku dengan penuh kesabaran, keiklasan serta tulus dalam membimbing penelitian ini hingga selesai, terimakasih banyak ibu.
- ❖ Untuk kawan- kawan ku khususnya mahasiswa reguler 2, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama.
- ❖ Untuk almamater merah kebangganku dan kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah membawa saya menjadi sosok manusia yang lebih baik lagi.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulisan Skripsi dengan judul “Pengaruh Kebijakan Pengelolaan Aset dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang” dapat penulis selesaikan dengan baik.

Penulisan Skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dalam Penulisan Skripsi ini, Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini tidak akan bisa terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Sehingga pada kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, guna mendukung kelancaran penyusunan Skripsi ini. Penulis dengan rasa hormat yang mendalam mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu
2. Ibu Furqonti Ranidiah, S.E., M.M. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Ibu Nensi Yuniarti. Zs, S.E., M.Ak. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang juga selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk mengarahkan serta memberikan bimbingan kepada Penulis dalam menyelesaikan Proposal ini.

4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
5. Suami dan anakku tercinta, kakak, adik dan seluruh keluarga serta rekan kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang yang telah memberikan dukungan, semangat dan do'anya yang tiada henti.
6. Semua teman dan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu terkhusus Program Reguler 2 Prodi Akuntansi yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan kemurahan hati mereka. Akhir kata penulis mengharapkan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membutuhkan.

Bengkulu, 7 Agustus 2025

Weni Herlianti
NPM. 2362201118P

ABSTRAK

PENGARUH KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASET DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Oleh:

Weni Herlianti¹
Nensi Yuniarti. Zs²

Permasalahan yang sering muncul dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, khususnya kabupaten empat lawang meskipun sudah tujuh tahun berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan untuk daerah yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang yang sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tanpa ada lagi temuan terkait Aset yang tertuang didalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, populasi pada penelitian ini adalah 53 orang pegawai pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, Tehnik analisis data dengan menggunakan uji analisis regresi linier berganda, analisis koefisien determinasi, dan uji hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kebijakan Pengelolaan Aset (X_1) dan Akuntabilitas (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil audit mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI.

Kata kunci: *Kebijakan Pengelolaan Aset, Akuntabilitas, Kualitas Laporan Keuangan*

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF ASSET MANAGEMENT AND ACCOUNTABILITY POLICIES ON THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS OF EMPAT LAWANG REGENCY

By:

**Weni Herlianti¹
Nensi Yuniarti, Zs²**

Issues frequently arise in achieving high-quality regional government financial reports, particularly in Empat Lawang Regency. Despite seven consecutive years of receiving an unqualified opinion (WTP) from the Supreme Audit Agency (BPK), several issues remain, as outlined in the audit report (LHP). This study aims to provide a comprehensive overview of how the Regional Finance and Asset Management Agency (BPKP) presents the Empat Lawang Regency Government's financial reports in accordance with established accounting standards, in order to achieve an unqualified opinion (WTP) from the BPK, without any further findings related to assets outlined in the audit report (LHP). This research is a quantitative descriptive study, with 53 employees of the Empat Lawang Regency government. Data collection techniques used were questionnaires. Data analysis techniques included multiple linear regression analysis, coefficient of determination analysis, and hypothesis testing.

The results indicate that variables Asset Management Policy (X1) and Accountability (X2) have a positive and significant effect on variable Financial Report Quality (Y) in the Empat Lawang Regency Government. This is evidenced by the audit results receiving an unqualified opinion (WTP) from the BPK-RI.

Keywords: *Asset Management Policy, Accountability, Financial Report Quality*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SERTIFIKASI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.5.1 Tujuan Umum	9
1.5.2. Tujuan Khusus	10
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II STUDI PUSTAKA	12
2.1 Theory Agency	12
2.2 Kebijakan Pengelolaan Aset	13
2.3 Akuntabilitas	17

2.4 Kualitas Laporan Keuangan	21
2.5 Penelitian Terdahulu.....	25
2.6 Kerangka Konseptual	32
2.7 Definisi Operasional.....	33
2.8 Hipotesis Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	39
3.2 Metode Penelitian.....	39
3.3 Populasi dan Sampel.....	40
3.3.1 Populasi	40
3.3.2 Sampel	40
3.4 Teknik Pengumpulan data	40
3.5 Teknik Analisis Data	42
3.5.1 Uji Instrumen.....	42
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	44
3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda	46
3.5.4 Koefisien Determinasi	47
3.5.5 Uji Hipotesis	48
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	50
4.1 Hasil.....	50
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Empat Lawang	50
4.1.2 Deskripsi Tanggapan Responden Terhadap Variabel Penelitian.....	52
4.1.3 Uji Instrumen	59
4.1.3.1 Uji Validitas	59
4.1.3.2 Uji Realibilitas.....	67

4.1.4 Hasil Uji Asumsi Klasik	68
4.1.5 Analisis Regresi Linear Berganda	72
4.1.6 Analisis Koefisien Determinasi	73
4.1.7 Uji Hipotesis	74
4.2 Pembahasan	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 2. 6 Definisi Operasional	33
Tabel 3. 1 Sampel.....	40
Tabel 3. 2 Skala Likert	42
Tabel 4. 1 Tanggapan Responden Terhadap Variabel X_1	52
Tabel 4. 2 Tanggapan Responden Terhadap Variabel X_2	55
Tabel 4. 3 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Y	57
Tabel 4. 4 Uji Validitas X_1	60
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas X_1	61
Tabel 4. 6 Uji Validitas X_2	62
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas X_2	63
Tabel 4. 8 Uji Validitas Y	64
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Y	66
Tabel 4. 10 Uji Realibilitas X_1	67
Tabel 4. 11 Uji Realibilitas X_2	67
Tabel 4. 12 Uji Realibilitas Y	67
Tabel 4. 13 Hasil Pengujian Reliabilitas	68
Tabel 4. 14 Uji Normalitas.....	69
Tabel 4. 15 Hasil Uji Multikolineritas	70
Tabel 4. 16 Analisis Regresi Linear Berganda	72
Tabel 4. 17 Analisis Koefisien Determinasi	74
Tabel 4. 18 Uji T	75
Tabel 4. 19 Uji F	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 5 Kerangka Konseptual	33
Gambar 4. 1 Hasil uji Heteroskedastisitas	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Keuangan merupakan suatu laporan yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi, atau lembaga dalam suatu periode waktu tertentu. Laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan, membantu dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan kinerja keuangan. Laporan keuangan terdiri dari beberapa jenis diantaranya Laporan Neraca, Laba Rugi, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pada prinsipnya penyajian laporan keuangan harus berdasarkan prinsip akuntansi berbasis akrual, sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat disajikan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya, serta laporan keuangan yang disajikan harus material dan relevan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang kinerja dan kondisi keuangan pemerintah daerah dalam satu periode anggaran. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai bagaimana anggaran pemerintah daerah digunakan, termasuk realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan perubahan ekuitas yang berfungsi sebagai pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat dan DPRD atas pengelolaan keuangan daerah. LKPD merupakan rapor dari Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan anggaran.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengacu pada tingkat keandalan, keakuratan, dan kejelasan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini sangat penting karena kualitas laporan keuangan mencerminkan kinerja keuangan dan pengelolaan anggaran public pada suatu daerah. LKPD yang berkualitas tinggi akan memberikan informasi yang akurat, relevan, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan. Hal ini sangat penting untuk memantau kinerja keuangan pemerintah daerah, mendukung pengambilan keputusan, kebijakan, dan memastikan akuntabilitas publik.

Di Indonesia Organisasi sektor publik di pemerintah berkembang dan bertumbuh secara cepat dan pesat beberapa waktu terakhir ini baik pemerintah pusat maupun daerah. Perkembangan ini tentu berdampak pada tuntutan akuntabilitas atas organisasi pemerintahan yang semakin meningkat juga. Dalam hal akuntabilitas finansial, pemerintah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan yang dilaksanakan secara periodik. Publikasi laporan keuangan ini merupakan tanggung Jawab baik pemerintah pusat maupun daerah.

Organisasi pemerintah merupakan lembaga atau entitas yang dibentuk oleh Negara untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan layanan publik. Organisasi ini memiliki berbagai bentuk dan tingkatan, mulai dari Kementerian dan Lembaga Non-Kementerian di tingkat Pusat, hingga Pemerintah daerah dan Pemerintahan Desa di tingkat Lokal. Organisasi Pemerintah memainkan peran penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta dalam menjaga stabilitas dan ketertiban negara. Pemerintah daerah diposisikan sebagai lembaga

yang bertanggungjawab untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, Pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat umum.

Salah satu contoh Pemerintah Daerah yang juga berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Empat Lawang yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku organisasi pemerintah daerah yang menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai satu kesatuan. Pengelolaan keuangan dan aset daerah memiliki peran yang tidak kalah penting. Karena kinerja pemerintah, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat akan berjalan baik dan lancar ketika keuangan dan aset daerah dikelola dengan baik, transparansi dan profesional.

LKPD membantu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan dan memberi opini yang disajikan. Dalam praktek penyusunan LKPD yang berkualitas, fenomena yang ada masih berbeda dengan harapan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) didapati masih banyak laporan keuangan pemerintah daerah belum menyajikan data keuangan yang sesuai dengan standar dan peraturan. Masih banyak penyimpangan yang terjadi dan berhasil ditemukan dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah (Wungow, 2016). Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat

memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik tersebut adalah relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

Permasalahan yang sering muncul dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas adalah masalah mengenai kebijakan pengelolaan aset dan akuntabilitas. Pemerintah daerah yang maju dan berkembang apabila terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabilitasnya tinggi. Namun pada kenyataannya di lapangan, masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang belum dapat menghasilkan sebuah LKPD yang sesuai dengan baik untuk disajikan pada saat audit dari BPK.

Kebijakan Pengelolaan Aset merupakan suatu rangkaian peraturan dan prosedur yang digunakan untuk mengelola aset suatu organisasi atau entitas. Tujuan kebijakan pengelolaan aset itu sendiri adalah untuk memastikan bahwa aset digunakan secara efektif dan efisien, serta untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan nilai aset itu sendiri. Kebijakan pengelolaan aset terdiri dari beberapa unsur diantaranya pengidentifikasian aset, pengklasifikasi aset, pengelolaan aset, pemeliharaan aset dan yang terakhir adalah pengawasan aset.

Kebijakan Pengelolaan Aset tetap (barang milik Negara) yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance*, dan diharapkan akan mampu meningkatkan keterandalan dalam pengelolaan keuangan negara. Fenomena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan opini penilaian wajar, tidak wajar maupun tidak memberikan pendapat, lebih sering disebabkan masalah kebijakan pengelolaan aset, dalam lembaga pemerintahan aset tetap merupakan komponen

utama yang memberikan kontribusi terhadap kelancaran kegiatan pemerintah. Hal ini terbukti pada Kabupaten Empat Lawang dengan ditemukannya permasalahan-permasalahan terkait Aset Daerah yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada tahun 2024. Dengan banyaknya temuan terkait aset tersebut menandakan bahwa beberapa entitas daerah masih terjadi penyimpangan peraturan dalam bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah (BMD) atau aset daerah.

Akuntabilitas merupakan tanggung jawab seseorang atau organisasi atas tindakan, keputusan, dan hasil yang dicapai kepada pihak yang memiliki hak untuk mengetahuinya. Dalam konteks organisasi, akuntabilitas mencakup tanggung jawab untuk menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas kepada pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas tidak hanya tentang pertanggungjawaban kepada atasan, tetapi juga kepada seluruh pihak yang memiliki hak untuk mengetahui dan menilai kinerja. Fenomena atas kesalahan pelaporan keuangan dan keterlambatan pelaporan keuangan, dapat menyebabkan kualitas laporan keuangan menurun dan keterlambatan dalam menyajikan laporan keuangan tahunan.

Hasil penelitian Luthfiani & M.Si.Ak, (2022) menunjukkan bahwa strategi pengelolaan aset daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan. Dengan demikian, hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat membantu pemerintah daerah dalam mengambil suatu kebijakan dalam pengambilan keputusan pengelolaan aset daerah. Berbeda dengan penelitian Ningsih, (2023) hasil analisis regresi linier menunjukkan bahwa

manajemen aset tetap memiliki dampak positif hanya sebesar 51,9% terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan kualitas laporan keuangan memiliki dampak positif hanya sebesar 64,5% terhadap keakuratan informasi keuangan.

Kabupaten Empat lawang salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, guna mendukung pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah membentuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai lembaga teknis yang mengelola keuangan dan aset daerah. Terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, hasil pemeriksaan keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan adanya peningkatan. Terlihat dengan adanya opini yang baik yaitu wajar tanpa pengecualian untuk tujuh tahun berturut-turut yang sebelumnya dimana pemerintah daerah kabupaten Empat Lawang mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. walaupun opini yang diperoleh WTP, tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan untuk daerah, yaitu pengelolaan aset yang berupa tanah dan bangunan yang belum memiliki sertifikat, Bangunan rehab yang pencatatannya masih terpisah dengan bangunan induk, kebijakan property investasi yang belum tertuang dalam kebijakan akuntansi. Hal ini menyebabkan aset negara tidak dipergunakan dengan baik dan seringkali digunakan tanpa hak oleh masyarakat yang berakibat menimbulkan permasalahan hukum.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya meneliti berapa besar pengaruh kebijakan pengelolaan aset terhadap kualitas laporan keuangan. Pada penelitian ini penulis menambah variabel baru untuk diteliti yaitu pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, penulis ingin

mengkaji lebih dalam lagi permasalahan apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan terkait pengelolaan aset dan akuntabilitas yang terjadi di Kabupaten Empat Lawang. Seperti bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang menginventarisasi aset yang mereka miliki. Dikarenakan, kegiatan inventarisasi aset juga merupakan salah satu indikator penting untuk menyelesaikan masalah mengenai pengelolaan barang milik daerah. Inventarisasi aset menjadi sangat penting karena dalam inventarisasi terdapat kegiatan pencatatan yang berguna untuk mengetahui jumlah barang atau aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah. Selain itu, pengelolaan aset daerah merupakan salah satu faktor penentu kinerja pemerintahan yang sehat, sehingga dibutuhkan adanya penerapan optimalisasi dalam penilaian aset daerah, yaitu: inventarisasi, identifikasi, legal audit, penilaian yang dilaksanakan dengan baik dan akurat, serta adanya sistem pengendalian yang terintegritas mengenai pengelolaan aset daerah.

Berdasarkan Uraian yang terdapat dilatar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“PENGARUH KEBIJAKAN PENGELOLAAN ASET DAN AKUNTABILITAS TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa masalah utama dalam Kebijakan Pengelolaan Aset dan Akuntabilitas pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang:

1. Kurangnya Transparansi

Apakah kebijakan pengelolaan aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang sudah transparan? Hal ini dapat diukur dengan Rasio Efisiensi Aset yaitu dengan mengukur tingkat efisiensi penggunaan aset dalam mencapai tujuan organisasi.

2. Kurangnya Akuntabilitas

Apakah kebijakan pengelolaan aset sudah akuntabel? Ini mencakup transparansi, pertanggungjawaban, kepatuhan dan efektivitas. Hal ini dapat diukur dengan Sistem Informasi Akuntabilitas untuk memantau dan memeriksa apakah kebijakan pengelolaan aset telah memenuhi standar akuntabilitas.

3. Kurangnya Pengawasan

Apakah kebijakan pengelolaan aset sudah memiliki pengawasan yang efektif? Hal ini dapat diukur dengan menganalisis dokumen terkait pengelolaan aset, melakukan wawancara dengan pihak terkait, melakukan observasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan aset di lapangan, dan melakukan survei terhadap pihak terkait dengan kebijakan pengelolaan aset untuk memperoleh informasi tentang efektivitas dan efisiensi pengawasan.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis:

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada Kebijakan Pengelolaan Aset dan akuntabilitas serta pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dibatasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang selaku Organisasi Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Periode Penelitian

Penelitian dilakukan pada periode anggaran dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian meliputi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bidang Aset, Kepala Bidang Akuntansi, Kasubbid Inventarisasi dan Pencatatan Aset, Kasubbid Pengamanan Aset, Kasubbid Akuntansi 1, Kasubbid Akuntansi 2 dan Staf Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang, dan Pengurus Barang OPD yang ada di Kabupaten Empat Lawang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah ditetapkan, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Kebijakan Pengelolaan Aset Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang?
2. Apakah Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk meneliti apakah Pengaruh Kebijakan Pengelolaan Aset dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang yang sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tanpa ada lagi temuan terkait Aset yang tertuang didalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

1.5.2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan pengelolaan aset terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang
2. Memahami bagaimana pengaruh Akuntabilitas terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Untuk Instansi kampus

Memberikan kontribusi pada literatur mengenai Pengaruh Kebijakan Pengelolaan Aset dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah dan menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai Pengelolaan Aset dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam konteks yang berbeda atau lebih luas.

2. Untuk Pemerintah Kabupaten Empat Lawang

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Organisasi Perangkat daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi kinerja keuangan, serta pengelolaan asset sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh manajemen Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta memberikan rekomendasi perbaikan kualitas Laporan Keuangan yang lebih baik terhadap Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Untuk Penulis

Penelitian ini bermanfaat dalam pemenuhan salah satu syarat penulis dalam menyelesaikan Pendidikan S1 Jurusan Akuntansi pada Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan memperdalam pemahaman tentang pengelolaan aset dan akuntabilitas serta Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah